

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pemberdayaan masyarakat adalah termasuk bagian penting dan perlu diatasi dalam memberdayakan terutama pada kelompok yang lemah dan mengalami rentan pada kemiskinan. Masyarakat seperti ini memang perlu dirangkul agar dapat memiliki kemampuan serta mempunyai kekuatan dan dapat lepas dari keterpurukan, ketertinggalan. Jika sudah terpenuhi dalam kebutuhannya akan menjadi kelompok yang maju, percaya diri serta mandiri.

Namun itu hanya istilah saja dan pemberdayaan bahkan mengalami ketidakmerataan dan istilah dalam pembangunan. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris yaitu dari kata “*Empowerment*” dan kata pembangunan dalam bahasa Inggris adalah dari kata “*Development*”. Kedua istilah tersebut mempunyai tujuan dalam menciptakan perubahan besar agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat.⁵

Rappaport mengartikan pemberdayaan adalah suatu proses individu, juga organisasi dan masyarakat bisa mengatasi dalam kebutuhan kehidupannya.⁶ Jika menurut Osmani mengartikan pemberdayaan adalah kondisi seseorang dalam keadaan berdaya dalam menciptakan situasi dan kondisi sehingga bisa berani menyampaikan kebutuhannya atau keluhannya yang diinginkan dan masyarakat tersebut terlibat pada kegiatan pemerintahan.⁷

Dan menurut *World Bank* dalam Haris arti pemberdayaan adalah usaha dalam memberi peluang dan kemampuan untuk kelompok yang lemah maksudnya yang memiliki kekurangan ekonomi agar mampu bangkit dan memiliki keberanian dalam memilih suatu aspek meliputi

⁵ Andi Haris, “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media,” *JUPITER XIII* (2014): 50–62.

⁶ Rappaport, *Studies in Empowerment: Introduction to The Issue Prevention In Human Issue*, (USA, 1984).

⁷ Osmani, *Participatory Governance, People’s Empowerment and Poverty* (Washington: UNDP, 2000).

sesuatu hal yang baik, dalam bertindak yang tidak hanya untuk keluarganya namun juga untuk dirinya dan bagi masyarakat disekitarnya maksudnya agar dapat bermanfaat kepada sesama.⁸

Namun, ada aspek yang juga tidak kalah penting dalam suatu proses pemberdayaan kepada masyarakat yaitu tentang masalah pada prinsip pemberdayaan. Dan apabila dalam melakukan pemberdayaan juga harus memiliki prinsip agar terarah atau mempunyai pedoman sehingga bisa mencapai hasil yang diinginkan. Adapun sasarannya adalah masyarakat yang rentan dalam permasalahan kemiskinan. Adapun menurut Dahana dan Bhatnagar dalam Haris mengatakan dalam suatu pemberdayaan memiliki beberapa prinsip dan harus diperhatikan. Prosesnya sebagai berikut:⁹

1. Kerja sama dan partisipasi

Maksudnya dalam memberdayakan masyarakat harus bersama masyarakat. Pemerintah tanpa masyarakat tidak cukup, karena makhluk hidup membutuhkan gotong-royong bersama agar dapat berhasil tujuannya tersebut. Masyarakat juga harus ikut aktif dalam membantu agar dapat terealisasi dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Menggunakan metode yang tepat

Artinya dalam melakukan seharusnya sesuai pada situasi dan kondisi keuangan masyarakat agar tepat sasaran kegiatan berdaya tersebut. Agar tidak hanya efisien dan efektif, tapi juga dapat berhasil dengan semestinya.

3. Demokratis

Maksudnya ialah ketika pemberdayaan dan masyarakat tentunya harus mempunyai hak suara agar dapat memutuskan bersama apa yang ingin dipilih untuk kemajuan hidupnya. Demokratis adalah memberikan kesempatan yang semestinya digunakan karena keputusan masyarakat juga dianggap penting untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

4. Minat dan kebutuhan

Pada dasarnya minat dan kebutuhan adalah suatu kesatuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Masyarakat

⁸ Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media."

⁹ Haris.

tentunya harus memperhatikan minat dan kebutuhannya sendiri, masyarakat harus mampu mengetahuinya dan bisa memilih atau dapat memprioritaskan minat namun sesuai kebutuhan agar bisa efektif juga efisien.

5. Kelompok bawah

Agar dapat menghasilkan yang terbaik dari program yang diciptakan sebelumnya tepat sasaran, maka pemberdaya ini mengarahkan agar orang yang rentan dalam kemiskinan atau orang pinggiran ini masuk dalam daftar program tersebut. Seharusnya yang diutamakan adalah mereka yang kurang mampu, agar tidak merasa dikucilkan.

6. Keragaman budaya

Memang dalam melakukan pemberdayaan harus memperhatikan kebudayaan sekitar, maksudnya dalam melakukan pemberdayaan di lingkungan masyarakat harus survei apakah ada keragaman budaya atau tradisi yang masih kental dalam mengisi kehidupan masyarakat tersebut, sebab jika hanya sesukanya dan tidak memiliki prinsip kesamaan budaya maka dikhawatirkan akan memiliki hambatan bahkan penolakan.

7. Terarah dan spesialis

Tenaga pemberdaya atau pembaharu atau penyuluh atau fasilitator harus dari orang yang memang sudah pengalaman atau yang memiliki pengetahuan dan ahli juga mempunyai ketrampilan karena pada dasarnya masyarakat yang masih kurang berdaya akan banyak menggantungkan dan juga butuh pertolongan dari tenaga pemberdaya.

8. Belajar sambil bekerja

Maksudnya pemberdaya tidak hanya menyampaikan teori dan tidak menghasilkan program yang dibuat namun harus melakukan bersama masyarakat tersebut, dan pemberdaya ini juga dituntut agar masyarakat bisa ikut serta secara aktif melakukan kegiatan tersebut dan didampingi pemberdaya dan tetap diarahkan sesuai konsep yang sudah dipelajari.

9. Perubahan budaya

Artinya dalam kegiatan tersebut pemberdaya tidak merubah budaya masyarakat seenaknya, agar dapat terlaksana dengan baik maka pemberdaya setiap melakukan kegiatan harus hati-hati dan tetap menjunjung tinggi kebudayaan setempat. Karena itu agar tepat sasaran

pemberdayaan juga guna pemberdayaan cepat selesai dengan lancar tanpa kendala suatu apapun.

10. Kepemimpinan

Maksudnya dalam kegiatan pemberdayaan tidak diperbolehkan hanya menguntungkan pihak satu saja. Tetapi keuntungan seharusnya untuk dimanfaatkan bersama karena hasil kerja keras bersama dan bisa sesuai harapan program yang sudah dibuat sebelumnya.

11. Segenap keluarga

Penyuluh atau pemberdaya alangkah baiknya memperlakukan keluarganya sebagai bagian dari sistem sosial dan tidak diistimewakan, namun justru harus sama dengan masyarakat yang berdayakan tersebut agar tidak merasa dibeda-bedakan supaya pemberdayaan sesuai keinginan bersama.

Sementara menurut dari pendapat yang lain yaitu kata dari Soeharto mengatakan bahwa prinsip dalam pemberdayaan dari perspektif pekerjaan sosial perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Pertama, pemberdayaan yaitu suatu kolaboratif. Dikarenakan pekerja sosial atau pemberdaya ini harus saling membantu atau berbagi kerja dengan partner.
- b. Kedua, suatu proses memberdayakan masyarakat harus menempatkan sebagai aktor atau yang menjadi pelaku dalam menjangkau kemungkinan dalam mencari kesempatan-kesempatan.
- c. Ketiga, masyarakat juga harus tahu dan percaya diri jika dirinya tersebut dapat menjadi atau membawa perubahan besar.
- d. Keempat, kompetensi tidak hanya dimulai hari ini namun dari pengalaman hidup, khususnya yang memberi pengalaman perasaan jika masyarakat mampu.
- e. Kelima, solusi-solusi asalnya dari situasi dan kondisi khusus, banyak ragam dan harus menghargai suatu keragaman dari faktor masalah yang dihadapi.
- f. Keenam, jaringan sosial informal harus dari sumber dan dukungan yang penting dan mempunyai kemampuan.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama Tjokrowinoto, 2005).

- g. Ketujuh, masyarakat harus berperan aktif dan mempunyai partisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, agar mencapai tujuan program yang sudah dibentuk itu.
- h. Kedelapan, tingkat sadar pada masyarakat adalah suatu kunci pada pemberdayaan, sebab mereka memerlukan pengetahuan agar dapat memperoleh hasil dari tindakannya itu.
- i. Kesembilan, pemberdayaan juga melibatkan akses terhadap kemampuan agar dapat efektif.
- j. Kesepuluh, pemberdayaan bersifat terus-menerus tanpa kata bosan agar dapat mengikuti arus peradaban dan terus dicari solusi agar dapat lebih maju lagi.
- k. Kesebelas, memberdayakan masyarakat harus dicapai dengan struktur personal dan membangun perekonomian guna tepat sasaran.¹¹

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk peningkatan terhadap harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.¹²

b. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap yang dalam pemberdayaan yaitu:¹³

¹¹ Andi Hari, *Memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan media*, Vol. XIII Nomor 2, JUPITER, (2014), 51-54.

¹² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dari tahapan pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bisa dilakukan melalui penyadaran terhadap potensi yang dimiliki masyarakat baik itu sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya itu sendiri. Selanjutnya pemberian rangsangan kepada masyarakat berupa pembenahan dan sekaligus penambahan ketrampilan guna memberikan posisi masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian. Setelah mereka mendapat itu selanjutnya barulah pemberian tanggung jawab untuk menuju kearah kemandirian dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berfikir menciptakan sesuatu yang baru yang lebih kreatif dan inovatif.¹⁴

c. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan dalam pengembangan masyarakat adalah agar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dapat mencapai kemandirian. Menurut Muslim dalam buku “Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial,” pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta menaikkan martabat masyarakat yang diberdayakan.

Edi Suharto, seperti yang diungkapkan dalam Alfitri merinci bahwa proses pemberdayaan harus melibatkan pendekatan 5P:¹⁵

¹⁴ Elly Susanti, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agrowisatabelimbing Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar” (IAIN Tulungagung, 2020).

¹⁵ Alfitri, *“Community Development” Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

- 1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan internal yang dapat menghambat kemajuan masyarakat itu sendiri.
- 2) Penguatan, yaitu Memperkuat ilmu pengetahuan dan keterampilan yang belum dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemecahan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Penguatan ini membantu masyarakat berkembang dan memiliki kepercayaan diri yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
- 3) Perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah agar tidak tertindas dan terhindar dari ketidakseimbangan sosial. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi kekerasan atau ancaman dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah.
- 4) Penyokongan, yaitu memberikan dukungan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan, serta memberikan peran penting kepada masyarakat dalam memberikan dukungan agar tidak merasa terisolasi atau terasing.
- 5) Pemeliharaan, yaitu memastikan keberlanjutan kondisi yang kondusif agar tercipta keseimbangan di masyarakat, memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan.¹⁶

Pemberdayaan juga diartikan sebagai pengembangan kekuatan individu dan peningkatan potensi daya manusia, termasuk akal pikiran, untuk mampu membela diri sendiri. Menurut Cholisin dalam Endah mengembangkan ekonomi bertujuan untuk memandirikan masyarakat dari kemiskinan.¹⁷

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Prinsip-prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan, atau *empowerment*, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam

¹⁶ Kiki Endah, *Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa*. Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 1, 2020, 140-141.

¹⁷ Kiki Endah, *Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa*. Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 1, 2020, 140-141.

mengambil keputusan dan membuka peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.¹⁸ Tujuan sebenarnya dari pemberdayaan adalah memberikan peran dan fungsi yang lebih besar kepada masyarakat serta mengarahkan proses peningkatan kemampuan ke dalam suatu arah yang mendalam.

Dalam mencapai tujuan tersebut, masyarakat menjadi pelaku atau aktor utama yang memiliki peran penting sebagai sumber kekuatan dalam menggerakkan roda pembangunan. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi masyarakat menjadi elemen kunci, dan kondisi ekonomi yang memberikan jaminan diharapkan dapat saling berperan. Masyarakat perlu memahami potensi yang dimilikinya agar dapat berkembang lebih baik.¹⁹ Menurut Irwin dalam Satar pemberdayaan adalah suatu proses yang memberikan kesempatan dan menciptakan kontribusi bermacam-macam dalam bentuk wawasan, keterampilan, energi khusus, atau perhatian terhadap sesama.²⁰

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pendekatan ini tidak hanya bergantung pada peran utama masyarakat tetapi juga memerlukan dukungan dalam bentuk bantuan ekonomi, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan kreativitas, membantu dalam pengambilan keputusan, serta memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Hasil yang dicapai diharapkan menjadi lebih baik.

Keberhasilan pembangunan masyarakat desa dapat dicapai dengan menjadikan masyarakat desa sebagai tokoh utama, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di

¹⁸ Saut M Lubis, *Agenda 21 Sektorial Buku 1 Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya Mencapai Kehidupan Yang Makin Berkualitas, Kerjasama Kantor Menteri Lingkungan Hidup Dengan UNDP*, 2000.

¹⁹ Sujali, "Paradigma Pembangunan Dalam Era Otonomi Daerah, (Bahan Pelatihan Kegiatan Fisik, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Code Utara)." (2001).

²⁰ L Hayat A Satar, "Pemberdayaan Masyarakat Desa, Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Gerabah Di Desa Penujok, Kecamatan Prayo Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat" (MAP UGM, 1992).

wilayah mereka sendiri. Dampak pembangunan yang dihasilkan akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah membina masyarakat agar dapat mengidentifikasi masalah dan menggali potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat berupa memberikan hasil pikiran untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah, menyumbangkan tenaga atau sumber daya finansial, serta berpartisipasi dalam pembangunan melalui gotong royong dan swadaya.²¹

e. Metode Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat lokal, yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait kebutuhan dan permasalahannya, perlu diberdayakan agar mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, merencanakan langkah-langkah pembangunan, dan melaksanakannya secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain, fokus pembangunan harus tertuju pada partisipasi dan keterlibatan rakyat, dengan konsep pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*).²²

Untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat harus dimulai dari tahap menentukan atau memilih program, melaksanakan program, hingga proses pemantauan dan evaluasi. Melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap ini dapat memberikan rasa kepercayaan kepada mereka, yang selanjutnya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan program juga akan dirasakan sebagai manfaat oleh masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Strategi ini dikembangkan dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA merupakan sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan partisipasi masyarakat desa dalam berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan

²¹ Santoso S. Hamidjojo, *Perkembangan Media Dan Teknologi Pendidikan* (Bandung: PPSP, 1997).

²² Satar, "Pemberdayaan Masyarakat Desa, Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Gerabah Di Desa Penujok, Kecamatan Prayo Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat."

kehidupan desa secara langsung, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana “dari, dengan, dan oleh” masyarakat desa. PRA mencakup analisis, perencanaan, dan tindakan, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti memberikan fasilitas untuk penyelidikan dan analisis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, serta saling berbagi informasi dan gagasan antara masyarakat desa dan fasilitator, serta antar organisasi yang berbeda.²³

Keterlibatan masyarakat harus dimulai sejak awal, terutama dalam penyusunan rencana kegiatan. Sebagai contoh, masyarakat harus diberi kepercayaan untuk membuat rencana kegiatan mereka sendiri, dan penunjukan kelompok yang akan menjadi sasaran kegiatan harus melibatkan musyawarah masyarakat untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif dan tidak menimbulkan kecemburuan.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam tahap pemantauan, di mana mereka membuat catatan dan laporan tentang pelaksanaan program. Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang muncul, kemudian dilakukan koreksi bersama dengan pembina. Melalui evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan, masyarakat dapat meningkatkan pelaksanaan program secara bertahap, membentuk kemandirian, dan dapat melanjutkan program serta mengatasi permasalahannya sendiri setelah kegiatan pembinaan berakhir. Metode ini membantu mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dapat ditangani dengan efektif. Dengan demikian, tujuan program pemberdayaan masyarakat desa, yakni mencapai kemandirian masyarakat, dapat tercapai sesuai dengan rencana, sehingga masyarakat dapat melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.

f. Faktor yang Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

Selain peran kepemimpinan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat, penting juga untuk menggali nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dalam masyarakat serta nilai-nilai agama yang menjadi pandangan hidup masyarakat setempat. Kehidupan di desa memiliki ciri khas yaitu terbukanya masyarakat yang ditandai

²³ Robert Chambers, *PRA Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996).

oleh keberlanjutan sistem kebersamaan dalam hubungan antar individu. Keterikatan yang kuat terlihat dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong-menolong, dan kerjasama ketika melaksanakan suatu pekerjaan.

Masyarakat desa juga terbiasa membicarakan semua urusan melalui musyawarah. Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat tradisional mengandung nilai-nilai universal, salah satunya adalah asas gotong royong. Asas gotong royong juga dikenal sebagai asas kemasyarakatan, asas komunal, dan asas kekeluargaan. Manusia dalam hukum adat dianggap sebagai individu yang terikat pada masyarakat, dengan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya dalam golongan atau persekutuan tertentu.²⁴ Asas gotong royong ini menghasilkan “paguyuban hidup,” yang berarti sebuah kesatuan masyarakat di mana setiap anggotanya merasa terhubung dan merasa memiliki jaminan bahwa segala hasrat dan kebutuhan mereka yang wajar akan mendapat perhatian setara dan dipenuhi sejauh mungkin; di antara anggota terdapat solidaritas. Masyarakat desa yakin bahwa dengan bekerja sama secara gotong royong, kepentingan mereka akan lebih terjamin dan lebih mudah tercapai daripada jika setiap individu bekerja sendiri.²⁵

Budaya tradisional yang masih berlanjut di kehidupan masyarakat desa, khususnya dalam suasana kebersamaan, memberikan dukungan penting bagi keberhasilan pembangunan di desa. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan membantu proses pembinaan, yaitu dengan mengumpulkan warga desa dalam kelompok-kelompok seperti kelompok ibu PKK, kelompok petani, kelompok nelayan, atau perkumpulan RT/RW. Dalam kelompok-kelompok ini, masyarakat bekerja sama dengan membagi tugas dan melakukan musyawarah atau mufakat untuk membahas permasalahan yang ada. Melalui kerjasama ini, masyarakat dapat bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran mereka dan sekaligus menumbuhkan semangat kerjasama.

Kerjasama ini menghasilkan rasa solidaritas di antara anggota kelompok, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, segala persoalan yang perlu dibicarakan akan dibahas melalui pertemuan anggota kelompok dengan

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982).

²⁵ Wignjodipoero.

musyawarah, dan keputusan yang diambil harus melibatkan kesepakatan atau mufakat dari semua anggotanya. Pendekatan ini mudah diterima oleh masyarakat karena musyawarah merupakan cara tradisional masyarakat desa dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Suyanto dalam Zuliyah berkaitan dengan upaya dalam memanfaatkan keberadaan budaya tradisional pada pemberdayaan masyarakat desa, berikut ini terdapat empat dasar yang sebaiknya dilakukan yaitu :

- a. Lembaga adat seperti sambat-sinambat dan bentuk solidaritas gotong royong sebaiknya dihidupkan kembali. Hal ini tidak hanya untuk mendukung kelancaran setiap kegiatan program pemerintah, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya rasa kolektivitas. Budaya tradisional dan kegiatan gotong royong harus berfungsi sejauh mungkin dalam mendorong kemandirian dan menghindari ketergantungan antar masyarakat.
- b. Memperhatikan dan bertindak demi kepentingan masyarakat desa atau berpusat pada rakyat. Tindakan ini diambil untuk menciptakan kondisi struktur mata rantai perdagangan yang dapat menjamin hak-hak masyarakat desa setempat.
- c. Melakukan langkah-langkah untuk mendukung kembali mekanisme redistributif yang bermanfaat dalam mengurangi penolakan dan beban hidup masyarakat desa miskin yang semakin berdampak. Salah satu contoh adalah menghidupkan kembali konsep lumbung desa.
- d. Diarahkan untuk meningkatkan fungsi mekanisme kontrol sosial di lingkungan desa. Semangat yang ada dalam lembaga musyawarah desa sebaiknya direvitalisasi untuk mengeluarkan dan mencegah dominasi perilaku aparat yang berlebihan.²⁶

2. Dampak Keberhasilan Pembangunan Jembatan Desa Kedungsari

a. Pengertian Pembangunan

Kata pembangunan menjadi hal yang menarik sebagai bahan perbincangan. Belum diketahui disiplin ilmu yang paling

²⁶ Siti Zuliyah. *Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah*, Volume I No. 2, Journal of Rural and Development, (2010), 153-159

benar untuk mengartikan definisi dari pembangunan. Pembangunan Indonesia sendiri yang telah direncanakan sejak masa kemerdekaan hingga sampai sekarang terus dilaksanakan demi perbaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kata pembangunan sendiri secara global diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kontinu dan keberlanjutan.²⁷

Pembangunan merupakan suatu proses menuju pencapaian tujuan negara, melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Maridikanto dalam Yanuarto menjelaskan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pemerintah bersama masyarakat atau oleh masyarakat dengan fasilitasi pemerintah. Teknologi yang dipilih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang sedang dan akan dihadapi, dengan tujuan menciptakan kehidupan layak atau kesejahteraan bagi seluruh masyarakat suatu bangsa.²⁸

Pengertian infrastruktur menurut Moteff dalam Yanuarto tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Vaughn and Pollard dalam Yanuarto lebih lanjut juga menyatakan bahwa infrastruktur umumnya melibatkan jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, serta fasilitas seperti sekolah, pusat kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.²⁹

Infrastruktur mencakup segala prasarana yang dibangun oleh pemerintah, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jenis-jenis infrastruktur melibatkan baik aspek fisik maupun non-fisik.

²⁷ Indriyani, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis" (Universitas Islam Riau, 2022).

²⁸ Wighnyo Yanuarto. *Analisis dampak pembangunan jembatan tanjungrejo terhadap sosial ekonomi desa tanjungrejo kecamatan madiun kabupaten madiun provinsi jawa timur*. Vol.12 No.2. Bulan Juni, (2023), 259-260.

²⁹ Wighnyo Yanuarto. *Analisis dampak pembangunan jembatan tanjungrejo terhadap sosial ekonomi desa tanjungrejo kecamatan madiun kabupaten madiun provinsi jawa timur*.

Pembangunan fisik menghasilkan perubahan konkret dan nyata yang dapat dilihat, sedangkan pembangunan non-fisik berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia.³⁰

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah, penyesuaian dengan program-program yang akan dilaksanakan menjadi kunci. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya, mengikuti program dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Menurut Blakely yang dikutip oleh Mudrajad Kuncoro dalam Arifah, pemilihan strategi pembangunan daerah perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan tindakan strategi, serta penyusunan target strategi.³¹

Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian desa. UU No. 6/2014 mengatur prinsip-prinsip yang termuat dalam pengaturan desa, seperti rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.³²

b. Prinsip Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi Pemerintah Desa (PEMDES) dalam penyusunan perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Strategis

Hasil perencanaan berupa pemikiran-pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap perencanaan visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kemudian perencanaan menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2) Demokratis dan Partisipatif

³⁰ Wighnyo Yanuarto.

³¹ Mir'atun Nur Arifah. Nugrahani Kusumastuti. *Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri Studi di Desa Kemandang Gunungkidul*. Vol. 2 no. 1. 2018. 182

³² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 5

Prinsip musyawarah dan partisipasi merupakan landasan penting dalam proses perencanaan di desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa.

3) Politis

Rencana pembangunan desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui perundang-undangan. Artinya hasil perencanaan pembangunan desa adalah sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai proses dengan kekuatan politik yang dilakukan oleh pemerintah desa.³³

c. Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan

Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan pembangunan desa harus memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Aspiratif

Mampu menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan dan keinginan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan desa.

2) Partisipatif

Mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa agar mau berpartisipasi sebagai pelaku pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Edukatif

Mampu membangun *mindset* (pola pikir) masyarakat sebagai pembelajar organisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan saling memberikan informasi, saling berbagi pengetahuan, saling menguatkan dalam pengalaman dan berbasis teknologi.³⁴

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Masyarakat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah:

1) Adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN.

³³ Fernandes Simangunsong, *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat* (Malang: Intelegensia Media, 2021).

³⁴ Simangunsong.

- 2) Adanya asset pembangunan berupa sumberdaya alam yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya.
- 3) Adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan dipedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunannya.
- 4) Adanya proyek bantuan pemerintah.
- 5) Adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan desa

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah:

- 1) Adanya perbedaan antar kemajuan kelompok masyarakat dalam arti ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
- 2) Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Belum terjadi pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia yang mampu merencanakan pembangunan.
- 5) Perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat kemajuan dalam masyarakat.
- 6) Adanya perbedaan pola pikir atau tingkat pendidikan masyarakat.³⁵

e. Dampak Pembangunan Jembatan bagi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan jembatan, jembatan dianggap sebagai struktur yang menghubungkan ruas jalan terpisah akibat adanya lembah, sungai, jurang, dan saluran irigasi. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2004, jalan raya dan bangunan jembatan dianggap penting sebagai sarana transportasi yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan jembatan, seperti Jembatan Kedungsari di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Jembatan Kedungsari, yang menghubungkan desa Delok dan desa Ngledok, memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Akses yang lebih mudah membantu percepatan perjalanan dan

³⁵ M. Syaifuddin, "Pembangunan Masyarakat Dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan" 12 (1999): 27.

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Studi lain juga menunjukkan bahwa pembangunan jembatan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha baru, memberikan *multiplier effect*, dan memotong waktu serta biaya dalam pelayanan ekonomi.

Namun, perlu diingat bahwa pembangunan jembatan juga dapat memiliki dampak negatif, seperti renggangnya interaksi sosial antar warga, kebisingan suara, dan degradasi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah dan demokrasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah menjadi acuan bagi penelitian ini, disertakan untuk membandingkan temuan-temuan yang telah ada. Selain itu, penambahan hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari dugaan kemiripan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosanna pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Dame cukup baik, namun untuk menyalurkan pemberdayaan masyarakat ke dalam organisasi ekonomi masyarakat sangat sulit sekali dilaksanakan. Bentuk organisasi ekonomi masyarakat yang ada di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh koperasi melalui peranan *Credit Union* (CU) Yapidi dan sebagian kecil pada bank-bank yang ada disekitar wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang diwujudkan dalam bentuk sumbangan pikiran berupa saran, pendapat dan gagasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil atau dilaksanakan.

Adapun kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosanna dengan penelitian peneliti adalah: Pertama metode

³⁶ Fadillah Umar Husein, Wahyu Hidayat, Dwi Susilowati. Dampak pembangunan jembatan terhadap sosial ekonomi masyarakat kademangan, kecamatan pagelaran, kabupaten malang. Vol 3. No 1, jurnal ilmu ekonomi, (2019), 1-2.

penelitian kualitatif. Kedua teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama jenis penelitian. Kedua objek penelitian. Ketiga tempat penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Azhari pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Kepala Desa Lubuk Hulu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditinjau dari mengumpulkan semua warga desa Lubuk Hulu dan para staf-nya untuk bersosialisasi, tahapan persiapan, musyawarah dusun, dan musyawarah desa.

Adapun kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosanna dengan penelitian peneliti adalah: Pertama metode penelitian kualitatif. Kedua teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama jenis penelitian. Kedua objek penelitian. Ketiga tempat penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal: (a) Keterlibatan dalam tahap perencanaan terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan dan relatif masih rendah; (b) Keterlibatan dalam tahap pelaksanaan tergolong baik; dan (c) Keterlibatan dalam tahap pengawasan tergolong tinggi. Kedua pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke yaitu keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dengan indikator: (a) Sumbangan dan dukungan; (b) Kesadaran atau kemauan masyarakat; (c) Adanya dana desa.

Adapun kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosanna dengan penelitian peneliti adalah: Pertama metode penelitian kualitatif. Kedua teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama objek penelitian. Kedua tempat penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Abadi Siregar pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-Hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-Hoda bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sihoda-Hoda. Namun jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cukup tinggi. Dimana masyarakat ikut serta dalam pembentukan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (MUSDES) yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sihoda-Hoda. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-Hoda yaitu adanya Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, adanya kemauan masyarakat untuk membangun dan mengelola sumber daya alam yang ada, dan adanya sumber daya alam yang cukup luas untuk dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-Hoda adalah kurangnya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Sihoda-Hoda, kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat, juga sebaliknya, dan minimnya kesadaran masyarakat atas rasa kepemilikan dengan apa yang mereka bangun.

Adapun kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosanna dengan penelitian peneliti adalah: Pertama metode penelitian kualitatif. Kedua teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah: Pertama jenis Penelitian. Kedua objek penelitian. Ketiga tempat penelitian.

C. Kerangka Berpikir

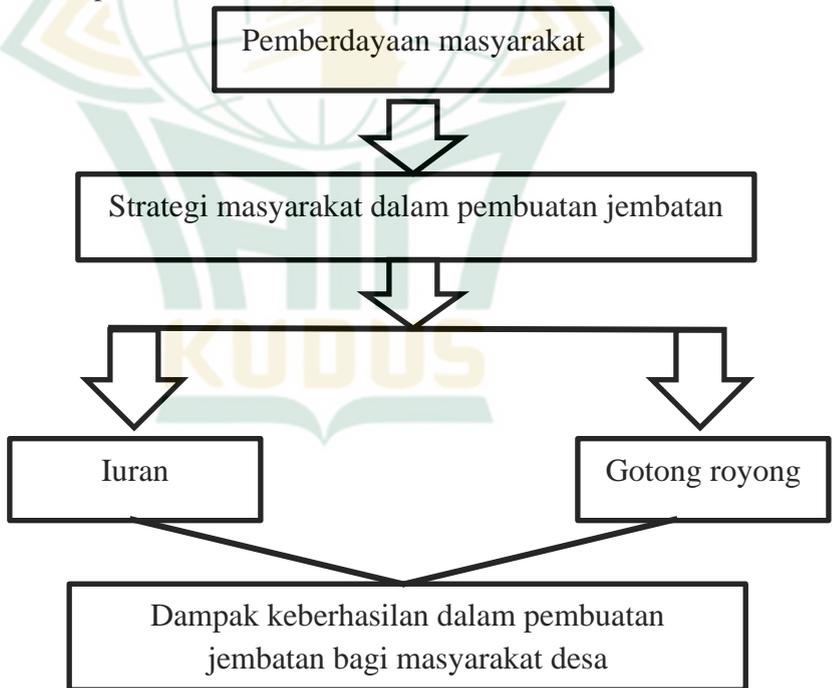
Kerangka berpikir merupakan salah satu bentuk atau gambaran yang menjelaskan tentang sesuatu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini difokuskan pada strategi pemberdayaan pembangunan jembatan partisipasi masyarakat melalui swadaya sehingga berdampak pada keberhasilan pembangunan jembatan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai proses pembangunan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam memulai kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi yang mereka alami. Permasalahan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dan perlu diatasi dalam memberdayakan terutama pada kelompok yang lemah dan mengalami rentan pada kemiskinan. Sebagai contoh dalam pemberdayaan pada proses pembuatan jembatan di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Desa tersebut merupakan desa yang memiliki solidaritas dalam pembangunan sangat besar, dimana ketika dalam pembangunan jembatan banyak yang memberikan dorongan untuk

melanjutkan pembangunan melalui iuran dari masyarakat sekitar dan pengerjaannya menggunakan sistem gotong royong.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jembatan di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus menerapkan sistem gotong royong yang artinya masyarakat saling berpartisipasi untuk membantunya, sehingga nantinya hal tersebut dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Adanya penerapan sistem tersebut, dapat menjadikan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi lingkungan.

Dampak positif dari adanya keberhasilan pada pembangunan jembatan di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dapat menciptakan solidaritas dan semangat gotong royong warga. Adanya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam melakukan gotong royong tersebut mencerminkan rasa kontribusi secara kolektif terhadap pembangunan desanya. Dengan demikian untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, kerangka berpikir penelitian dibuat dalam bentuk skema seperti berikut:



Tabel 2.1 Kerangka Berpikir